

PERBUDAKAN DAN BURUH MIGRAN DI TIMUR TENGAH

Oleh: Abdul Fadhil

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Abstract

Slavery is a state in which a person possesses or takes control over someone else. Some historians state that it began to emerge ensuing agricultural expansion, approximately ten thousand years ago. It grew along the development of trade and industry. In fact, the increase of trade and industry has stimulated the demand for labor to multiply the products for export. Therefore, more labors both local and migrant are needed. Migrant labor is one migrating from one's birth place to another location and then works and stays in a new place in a certain period of time. Hence, the difference in culture and perception between the labor and the employer may lead to intrincating problems. This is what has happened to Indonesian labor who works in another country. This paper attempts to examine the core problem between labor issue and migrant labor, specifically in the Middle East.

Keywords: slavery, migrant workers, migrant workers.

Abstrak

Perbudakan adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki atau mengambil kendali atas orang lain. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa itu mulai muncul berikutnya ekspansi pertanian, sekitar sepuluh ribu tahun yang lalu. Ini tumbuh di sepanjang perkembangan perdagangan dan industri. Bahkan, peningkatan perdagangan dan industri telah mendorong permintaan tenaga kerja untuk memperbanyak produk untuk ekspor. Oleh karena itu, lebih banyak tenaga kerja lokal maupun migran yang diperlukan. Buruh migran adalah salah satu migrasi dari tempat kelahiran seseorang ke lokasi lain dan kemudian bekerja dan tinggal di tempat yang baru dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, perbedaan budaya dan persepsi antara buruh dan majikan dapat menyebabkan intrincating masalah. Ini adalah apa yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji masalah inti antara isu buruh dan tenaga kerja migran, khususnya di Timur Tengah.

Kata kunci: perbudakan, TKI, buruh migran

A. PENDAHULUAN

Perbudakan adalah keadaan di mana orang menguasai atau memiliki orang lain. Sebagian ahli sejarah mengatakan, perbudakan mulai timbul sesudah pengembangan pertanian, sekitar sepuluh-ribu tahun yang lalu. Awalnya, para budak terdiri dari penjahat atau orang-orang yang tidak bisa membayar hutang. Ada kalanya tawanan perang diperlakukan sebagai budak untuk bekerja oleh pihak penawan. Ketika terjadi peperangan, kaum yang kalah juga diperlakukan sebagai budak oleh kaum yang menang.

Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. Meningkatnya perdagangan dan industri meningkatkan permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Para budaklah yang melakukan sebagian besar dari pekerjaan tersebut. Kebanyakan orang kuno berpendapat bahwa, perbudakan merupakan keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktek jahat atau tidak adil. Di kebanyakan negara, budak dapat dibebaskan oleh pemiliknya untuk menjadi warga-negara biasa.

Kini perbudakan secara resmi memang sudah dihapuskan. Namun, amat disayangkan perbuatan-perbuatan yang tidak jauh berbeda dengan praktek-praktek perbudakan sampai sekarang masih tetap ada. Misalnya, persoalan perburuhan dan tenaga kerja, khususnya menyangkut buruh migran, yang hampir mirip dengan tindakan perbudakan itu sendiri, bahkan mungkin dimaknai sebagai perbudakan itu sendiri. Tulisan ini mencoba untuk menelusuri benang merah antara masalah perbudakan dan buruh migran di Timur Tengah yang menjadi perhatian banyak orang pada saat ini. Tulisan ini memaparkan persoalan tersebut di atas dengan harapan semua orang dan semua bangsa menghapuskan praktek-praktek perbudakan dan perdagangan manusia yang jelas-jelas yang bertentangan dengan semangat kemanusiaan.

B. Sejarah Singkat Perbudakan

Menurut ahli sejarah, perbudakan pertama-tama diketahui terjadi di masyarakat Mesopotamia (Sumeria, Babilonia, Asiria, Chaldea). Perekonomian kota yang pertama berkembang di sana, dilandaskan pada teknologi pertanian yang berkiblat pada kuil-kuil, imam, lumbung, dan para juru tulis. Surplus sosial menyebabkan terjadinya lembaga ekonomi yang berdasarkan pada peperangan dan perbudakan. Administrasi untuk surplus yang harus disimpan, menimbulkan kebutuhan akan sistem akuntansi. Masalah ini melahirkan sistem tulis-menulis sekitar 6.000 tahun yang lalu.¹

Kebudayaan Mesopotamia bertahan beribu tahun di bawah pemerintahan yang berbeda. Pengaruhnya memancar ke Siria dan Mesir melalui perdagangan dan peperangan. Sejalan dengan proses migrasi dan perdagangan yang telah berlangsung sekian lama, pengaruh kebudayaan Mesopotamia juga sampai ke India dan Cina. Sedangkan untuk benua Amerika, terdapat dua pendapat mengenai migrasi penduduk kuno ke benua tersebut. Pendapat pertama dan yang paling populer adalah penduduk asli Amerika berasal dari Asia yang melintasi Selat Bering (Amerika Utara) dan kemudian menyebar ke seluruh benua Amerika dengan membawa serpihan kebudayaan dari tanah asalnya di Asia. Pendapat kedua, penduduk asli Amerika berasal dari Afrika Utara yang melintasi Atlantik dan masuk ke Amerika Tengah dan Selatan dengan membawa serpihan budaya kuno Afrika Utara.

Perdagangan budak Arab pada budak Afrika hitam dimulai berabad-abad sebelum perdagangan budak kulit putih, dan berakhir berabad-abad setelah perdagangan budak kulit putih pula. Sesungguhnya, perbudakan masih ada hingga sekarang, seperti di Mauritania, Mali, Sudan, dan Saudi Arabia. Perdagangan budak Arab ditekan oleh pihak Inggris pada akhir abad ke 19, lewat senjata dan ancaman. Pelabuhan dikuasai oleh sultan Muscat dan Oman - kepulauan Zanzibar dan Pemba - dimana para budak dikumpulkan dan dikapalkan ke Muscat, dan dari sini didistribusikan ke semua pasar

¹ Bernard Lewis, *Race and Slavery in the Middle East* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 12.

budak Muslim; Kairo, Damaskus, sampai ke Istanbul.² Kolonialisme Inggris dan Perancis pada akhirnya mengakhiri perbudakan di sebagian besar Afrika dengan menguasai daratan dan perdagangan di laut. Kekuatan Amerika dan Eropa akhirnya mengakhiri bajak laut Muslim di abad ke-19. Tekanan politik, ekonomi, dan militer, terutama dari Inggris, memaksa negara-negara Muslim melarang perbudakan. Arab Saudi dan Yaman melarangnya tahun 1962, sementara Mauritania telah melarangnya tiga kali, terakhir tahun 1980. Walau begitu, praktek perbudakan terus terjadi di Arab Saudi hingga sekarang.

C. Konsep Islam Tentang Perbudakan

Tuhan ingin agar perbudakan itu dihapus dalam kehidupan karena perbudakan itu sungguh tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Namun tidak ada satu pun teks dalam Al-Quran yang secara jelas menyatakan bahwa perbudakan harus dihapuskan. Pendekatan yang digunakannya berbeda dengan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah *khamr*, poligami, atau riba. Sejarah menunjukkan bahwa manusia di jaman dahulu melakukan perbudakan dengan berbagai cara, dan menganggap budak sebagai sebuah '*property*' yang bisa diperjualbelikan dan diperlakukan seperti barang. Perlakuan tersebut dianggap legal dan merupakan suatu hal yang wajar. Tentu saja saat ini manusia masih mempraktekkan perbudakan modern yang bisa tidak kalah kejam dan nistanya dengan jaman dahulu. Bedanya hal tersebut sekarang merupakan tindakan yang illegal alias melanggar hukum. Barangsiapa yang melakukannya maka akan mendapat hukuman (hukum negara) dan hukuman moral dari masyarakat sebagai orang yang tidak beradab.

Perbudakan yang dipraktekkan oleh umat manusia adalah tindakan yang buruk dan nista di mata Tuhan. Oleh sebab itu maka Tuhan ingin menghapuskannya dengan menurunkan nabi-nabinya. Meskipun demikian, Tuhan tidak serta merta menghapuskannya dalam sekejap, karena perbudakan sudah berlaku di masyarakat sejak berabad-

² Purwati Soeprapto dan S. Soeprapto, <http://www.voanews.com/indonesian/news>, diunduh tanggal 22 Desember 2010

abad lamanya. Sebuah aturan atau hukum baru semestinya disosialisasikan dan dijalankan secara bertahap, sehingga hukum dan aturan tersebut dapat dipahami, diterima dan dilaksanakan oleh manusia. Hukum tentang larangan minuman yang memabukkan menunjukkan betapa Tuhan melakukan sosialisasi dan tahapan-tahapan dalam penerapannya. Hukum itu tumbuh dan diterima secara bertahap dalam masyarakat.

Islam adalah agama yang secara jelas menentang perbudakan dan juga secara nyata melakukan upaya-upaya kongkrit dalam menghapusnya. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang mengecam tindakan kesewenang-wenangan antar manusia dan ada banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh umat Islam untuk membebaskan budak-budak yang mereka miliki sebagai '*barter*' untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa lainnya. Tuhan memang tidak frontal dan main kuasa begitu saja dalam menerapkan aturannya karena Tuhan Maha Tahu bahwa manusia adalah manusia dan manusia butuh waktu untuk memahami dan menerima sebuah aturan yang sebelumnya tidak ada. Malaikat lebih cepat untuk menerima perintah atau aturan dari Tuhan meski mereka juga bisa mempertanyakan 'kebijakan' yang diambil oleh Tuhan. Hanya iblis yang langsung menolak hukum, aturan atau perintah Tuhan secara langsung dan terang-terangan.

Ayat-ayat AlQur'an yang mendorong umat Islam untuk membebaskan perbudakan dapat dilihat pada beberapa kasus berikut:

- Sebagai denda pidana pembunuhan (QS An-Nisa : 92)
- Denda melanggar sumpah (QS Al-Maidah : 89)
- Denda terhadap orang yang menzhihar (QS. AL-Mujadilah : 3)
- Dorongan untuk menmpuh "jalan yang mendaki lagi sukar itu" (QS Al-Balad : 10-13)
- Pembagian harta zakat, budak termasuk yang berhak mendapatkannya. Harta itu dapat digunakannya untuk menebus dirinya dari perbudakan (QS. At-Taubah: 60).
- Perjanjian kepada budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil harga dirinya (QS. An-nur : 33)

Dengan demikian perbudakan memang benar-benar serius untuk dihapuskan dengan diturunkannya agama Islam tersebut. Islam mengajarkan bahwa membebaskan budak adalah sebuah kebajikan yang bernilai tinggi. Islam tidak hanya bicara secara teori, tetapi langsung dipraktekkan oleh umatnya pada saat itu. Mengawini budak yang dimiliki adalah salah satu cara Islam untuk membebaskan status seorang budak menjadi setara dengan tuannya.

Pandangan Islam terhadap perbudakan bersifat sangat revolusioner untuk masa tersebut. Islam hadir pada 14 abad yang lalu dengan mengenalkan konsep kesetaraan manusia. Itu juga sebabnya mengapa para bangsawan Quraisy sangat menentang Islam, tetapi sebaliknya kaum marginal bersemangat menerima Islam.

Jelas sekali bahwa agama Islam sangat menentang perbudakan, dan Nabi Muhammad telah berupaya untuk membebaskan manusia dari perbudakan sejak saat itu. Namun sebagaimana dalam masalah *khamr* yang diberlakukan secara bertahap, maka bisa dipahami mengapa ayat-ayat al-Qur'an periode Mekkah masih membolehkan dan mentolerir perbudakan. Misalnya, tuan lelakiizinkan "menggauli atau mengumpuli" budak-budak wanita yang mereka miliki. Al-Quran tidak menggunakan sistem pengharaman secara eksplisit, karena tidak ada nash yang dengan tegas melarang perbudakan. Tetapi semangat yang dibawa oleh ayat-ayat Al-Qur'an adalah pembebasan perbudakan.

Secara tekstual ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat yang membolehkan umat Islam menjalankan perbudakan pada saat sistem perbudakan itu memang ada sebagai realitas sosial. Meskipun demikian, hal itu sama sekali tidak bermakna bahwa Islam menganjurkan atau mempertahankan berlakunya perbudakan. Hal itu hanya berlaku bila perbudakan itu ada sebagai realitas sosial yang berlaku pada suatu tempat dan zaman tertentu. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman terhadap konteks yang ada pada saat itu. Konteks masyarakat sekarang jauh berbeda dengan konteks ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Membaca dan memahami perbudakan secara tekstual saja akan membawa pembaca pada pemahaman yang paradoks dengan semangat Al-Quran.

Perbudakan dalam beberapa hal dapat dibandingkan dengan poligami. Seperti halnya poligami, perbudakan juga merupakan sebuah realitas sosial yang ada pada semua bangsa. Perbudakan dan poligami lambat laun akan menjadi terhapus seiring dengan bertambah majunya pemikiran dan peradaban manusia, meningkatnya kesetaraan antara ras dan gender, serta tumbuhnya rasa kemanusiaan dan keadilan umat manusia terhadap sesamanya. Jadi meski dalam teksnya Al-Quran tidak secara nyata melarang perbudakan, tetapi pada hakikatnya upaya penghapusan perbudakan telah dijalankan dengan sangat serius pada saat Al-Qur'an diturunkan. Jika saat ini Konvensi Jenewa tentang masalah hak azasi manusia telah disepakati oleh semua bangsa, maka sebenarnya boleh dibilang gerakan ini sudah dipelopori oleh Islam sejak belasan abad yang lalu.

D. Buruh Migran

Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif lama. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.

Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan "orang desa yang bekerja di kota." Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).

Pekerja migran internal muncul disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, dan rendahnya daya serap industri di perkotaan. Penyebab urbanisasi di Indonesia termasuk dalam kategori “urbanisasi tanpa industrialisasi”, “urbanisasi berlebih” atau “inflasi perkotaan”³. Fenomena ini menunjuk pada keadaan dimana pertumbuhan kota berjalan cepat namun tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai, khususnya di sektor industri dan jasa. Akibatnya, para migran yang berbondong-bondong meninggalkan desanya dan tanpa bekal keahlian yang memadai tidak mampu terserap oleh sektor “modern” perkotaan. Mereka kemudian bekerja di sektor informal perkotaan yang umumnya ditandai oleh produktivitas rendah, upah rendah, kondisi kerja buruk, dan tanpa jaminan sosial.

Sejatinya, persoalan utama pekerja migran internal terkait erat dengan kondisi sektor informal perkotaan yang kerap disebut sebagai “*underground economy*” itu. Sebagai contoh, mereka yang bekerja sebagai pedagang kakilima sering menghadapi permasalahan seperti penggusuran, permodalan yang kecil, konflik dengan penduduk setempat, konflik dengan pengguna lahan publik lain (pejalan kaki, sopir angkutan kota, pemilik mobil pribadi, pemilik toko), dan konflik dengan petugas keamanan.

Persoalan lain yang cukup serius mengenai pekerja migran ini adalah menyangkut fenomena “pekerja migran anak-anak” yang meliputi anak jalanan, pekerja anak, dan anak perempuan yang dilacurkan (AYLA). Dalam laporannya, *A Country Strategy for Children and Women, 2001-2005*, pemerintah Indonesia dan UNICEF memperkirakan jumlah pekerja anak sebesar 1,8 juta jiwa dan AYLA sebanyak 40.000-70.000 anak.⁴ Selain bekerja di sektor yang berbahaya, mereka memiliki upah rendah, rawan eksploitasi, perlakuan salah (*abuse*), serta tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial vertikal. Mereka kemungkinan besar terjebak dalam “lingkaran kemiskinan” (*vicious circle of poverty*).

³ Edi Suharto, Edi, *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial*, 2005, dalam www.Policy.hu, diunduh 23 Desember 2010.

⁴ *Ibid.*

Pekerja migran internasional memiliki persoalan yang lebih kompleks lagi. Arus migrasi tenaga kerja ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan melonggarnya hambatan-hambatan resmi migrasi di negara-negara yang tergabung dalam World Trade Organisation (WTO).⁵ Melonjaknya arus migrasi ini pada hakekatnya merupakan *resultante* dari perbedaan tingkat kemakmuran antara negara maju dan berkembang. Pembangunan ekonomi yang tinggi di negara maju telah mendorong upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi di negara maju meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Secara umum, permintaan tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya. Sedangkan permintaan akan tenaga kerja tidak terlatih “terpaksa” didatangkan dari negara berkembang. Pekerja dari negara-negara maju sendiri seringkali tidak tertarik dengan pekerjaan yang menurut kategori mereka bergaji rendah.

Sementara itu, kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan upah rendah di negara berkembang mendorong penduduk untuk mengadu nasib ke negara maju meskipun tanpa bekal (keahlian, persiapan, dokumen) yang memadai. Sebagian besar pekerja migran dari negara berkembang ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal. Namun, sebagian dari pekerja migran ada yang termotivasi oleh alasan lain, seperti keagamaan (pergi haji, umroh), khususnya di Arab Saudi.

Faktor pendorong dan penarik di atas sebenarnya merupakan hukum ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Persoalan menjadi lain manakala tenaga kerja dari negara pengirim bermigrasi secara ilegal dan/atau tanpa keahlian serta persiapan yang diperlukan. Dalam konteks ini, munculah dua macam migrasi, yaitu migrasi legal (resmi) dan migrasi ilegal (gelap). Status gelap inilah yang kemudian menyebabkan pekerja migran sangat rentan mengalami permasalahan sosial-psikologis.

⁵ Elwin Tobing, *Migrasi Tenaga Kerja Global*, 2004, dalam www.theindonesianinstitute.org, diunduh 27 Januari 2011.

Dalam arus migrasi ini, terdapat fenomena lain yang disebut “feminisme migrasi,” yakni, bahwa migrasi semakin didominasi oleh anak gadis dan perempuan⁶. Akibatnya sistem ekonomi lokal menyebabkan banyak anak-anak gadis dan perempuan yang diekspos ke tempat-tempat kerja global guna mencari penghidupan. , situasi ini akan semakin menjadi-jadi di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami konflik dan perpecahan. Dalam konteks Indonesia, feminisme migrasi ini terjadi dalam bentuk pengiriman TKW besar-besaran antara lain ke Hongkong, Arab Saudi, Malaysia dan Singapura.

Di Singapura, pada tahun 2002 terdapat sekira 450 ribu pekerja migran. Dari jumlah tersebut, lebih dari 140 ribu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia diperkirakan mencapai 60 ribu orang, selebihnya berasal dari Filipina, India, Sri Lanka dan Burma.

E. Derita Buruh Migran di Timur Tengah

Ledakan minyak dunia di era 1970-an dan puncaknya 1980-an membuat negara-negara Timur Tengah menjadi negara kaya dengan petrodollarnya. Imbasnya adalah membuat ketertarikan para pencari kerja di seluruh dunia untuk mengadu nasib di sana. Jutaan orang berusaha mencari rezeki di sana dengan menjadi tenaga kerja (buruh), baik di sektor formal maupun informal, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun sayangnya, hampir semua TKI tersebut bekerja di sektor informal dengan bekerja seperti pembantu rumah tangga (PRT) terutama para wanita, pekerja kasar, ataupun menjadi supir bagi TKI pria.

Perbedaan budaya dua negara dan cara pandang mereka terhadap TKI menyebabkan munculnya problema-problema yang sangat kompleks. Problematika inilah yang kebanyakan membawa penderitaan dan nestapa para TKI di sana. Terlebih-lebih lagi, hampir semua negara-negara Timur Tengah sampai saat ini belum ada yang

⁶ M Chatib Basri, *Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita*, dalam *Harian Kompas*, tanggal 25 Januari 2002.

mau menandatangani Konvensi Migran yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) di bawah PBB. Hal ini disebabkan cara pandang (anggapan) bagi orang Arab bahwa para buruh (TKI) tersebut sama dengan budak. Artinya, ketika mereka mempekerjakan para TKI dengan memesannya lewat agen, mereka menganggapnya telah melakukan transaksi jual beli budak. Dan, bagi para TKI sejak saat itulah sebenarnya awal dari penderitaan tersebut.

Potret tragis Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia, kembali terpajang di media nusantara. Lewat Sumiati, kali ini berita memilukan itu menyeruak ke seantero negeri. Alih-alih mengirim uang kepada kerabat, untuk sekadar berkirim kabar saja, ia sangat dibatasi. Perlakuan teramat buruk justru terjadi atas dirinya. Sumiati bahkan hampir tak dapat dikenali, akibat lebam yang mendominasi tubuhnya. Ruyati, dihukum pancung tanpa sepengetahuan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah jelas geram, namun upaya itu baru sebatas penawar untuk luka yang terlanjur ada, bukan sebagai obat pencegah luka-luka berikutnya. Faktanya, kabar tragis TKW selalu hadir mengisi berita di media-media, padahal di satu sisi mereka kerap dijuluki sebagai pahlawan devisa.⁷

Kendati hal yang sama juga terjadi atas TKW di selain Timur Tengah, tapi fenomena TKW yang terjadi di Timur Tengah agaknya memiliki korelasi dengan sistem kehidupan bangsa Arab secara umum. Sebagaimana yang diketahui, peradaban Arab dan Timur Tengah masih menyisakan nostalgia masa-masa jahiliyah. Masa yang menodai sakralitas nilai kemanusiaan. Manusia di masa itu terbagi dalam banyak strata, yang dari satu tingkat ke tingkat di bawahnya, memiliki sebetulnya daya. Budak, menjadi strata terendah, bahkan nilai manusia mereka tak sepenuhnya diakui, lantaran dianggap manusia yang tak merdeka. Maka sang pemilik, boleh berbuat apa saja atas diri mereka, tanpa dibatasi norma dan etika.

Kehadiran Islam menjadi batu loncatan mengubur tradisi buruk itu. Lewat regulasi syariat yang komprehensif, Islam menyiasati

⁷Erfani el-Islamiy, *TKW dan Paradigma Perbudakan*, dalam <http://www.pontianakpost.com>, 4 Januari 2011, diunduh 27 Januari 2011.

pemerdekaan budak, sebagai salah satu cara membayar kesalahan. Tapi, kesempurnaan syariat tak sepenuhnya memiliki daya yang cukup untuk menghadirkan kesempurnaan pula bagi manusia sebagai pelakunya. Banyak tradisi jahiliah yang hingga kini tak kunjung dapat dipadamkan kobarnya. Tradisi-tradisi itu kendati terselubung, namun masih kokoh terpatri dalam sebagian besar masyarakat Timur Tengah. Mereka jelas tak mengenal tenaga kerja, pembantu rumah tangga, atau pengasuh anak, kerena yang mereka kenal hanyalah sebuah kalimat klasik, "*raqabah*", atau umum disebut budak perempuan.

Kenyataan maraknya 'penyiksaan' TKW Indonesia di Timur Tengah, adalah informasi penting tentang eksistensi 'kejahiliah'. Indonesia harus sedianya memandang hal itu sebagai kenyataan, sehingga perlindungan TKW harus pula mempertimbangkan aspek tersebut. Karenanya, pengiriman tenaga kerja untuk wilayah Timur Tengah tidak lagi diorientasikan pada jasa pembantu dan pengasuh anak, atau jasa-jasa lain yang berkenaan langsung dengan kerumahtanggaan. Karena jasa-jasa di bidang ini, akan sangat rentan menjadi wadah warisan jahiliah yang kelam itu.

Kendati tenaga kerja Indonesia itu dibekali keterampilan, namun yang sejatinya dijual dari mereka adalah tenaga-tenaga lugu khas perkampungan. Iming-iming ke luar negeri dengan penghasilan lebih, telah menjadi magnet pengeruk hasrat-hasrat lugu itu. Untuk itu, pemerintah harus sesegera mungkin membentuk konsep mutakhir perihal tenaga kerja ini. Pengiriman tenaga kerja, harus diorientasikan pada lini-lini di luar negeri yang benar-benar membutuhkan keterampilan, bukan tenaga apa adanya. Sehingga negara nantinya, tidak lagi menggunakan istilah Tenaga Kerja Indonesia, melainkan Tenaga Terampil Indonesia, yang diproyeksikan pada aspek selain kerumahtanggaan. Semisal sebuah perusahaan di luar negeri yang bergerak di bidang kerajinan patung dan gendang, maka Indonesia akan mengirim tenaga terampil pengrajin patung dan gendang, bukan tenaga yang hanya dimanfaatkan untuk gotong-gotong saja. Dengan demikian, selain mereka akan dibayar sesuai profesionalitas, juga perlindungan itu akan lebih merata lantaran pekerjaanya tak hanya dari Indonesia, tetapi juga warga negeranya sendiri, dan negara-negara lain.

Menjamurnya perusahaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, juga menjadi bukti betapa diminatinya bidang yang satu ini. Bisnis ini nyatanya telah berhasil menyejahterakan ribuan orang, sekaligus menipkan pilu berkepanjangan di ribuan orang pula. Sehingga tak salah, jika kepergian ke luar negeri disebut sebagai ajang mengadu nasib, artinya mungkin baik mungkin tidak. Kalimat itu mestinya bisa diubah, menjadi slogan bahwa ke luar negeri itu adalah ajang menyambut hasil baik, bukan untung-untungan. Hal ini akan terwujud, manakala pekerja yang dikirim itu adalah tenaga terampil dan memiliki kualifikasi yang mumpuni. Jika memaksakan diri memberangkatkan pekerja dengan modal tenaga apa adanya, apalagi diproyeksikan untuk bidang kerumahtanggaan di Timur Tengah, maka itu berarti kerelaan memasuki sisa-sisa jahiliyah yang menyeramkan. Sampai saat ini, derita yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah masih terus terjadi. Mereka yang di Saudi Arabia, Kuwait, dan Negara Timur Tengah lainnya masih sering menderita akibat penyiiksaan. Sering kali mereka pulang bukan membawa real atau dolar, melainkan depresi berat atau bahkan kematian.

Problem ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri memang sangat krusial. Memang, banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri telah memperingan beban tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki perekonomian. Keberadaan mereka turut pula menambah devisa bagi negara yang tidak sedikit jumlahnya. Meski demikian, justru berbagai masalah muncul di pihak lain. Minimnya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di luar negeri, kurangnya jaminan keamanan dan kesejahteraan TKI di tempat mereka bekerja, problem hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara tempat para TKI bekerja akibat persoalan sosial, ekonomi, politik dan masalah keamanan yang ditimbulkan oleh adanya TKI tersebut, menjadi masalah yang masih terus menghantui para TKI.

Nilai kehidupan dan rasa aman dalam hidup mereka tak pernah ada kepastian yang jelas. Hukum tak pernah berpihak kepada mereka dan malah hukum kerap membuat mereka menderita. Kemerdekaan mereka diperas oleh para jaringan mafia yang dengan terang-terangan dan vulgar melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Para mafia

pekerja itulah yang berpesta memperoleh keuntungan yang begitu besar di tengah jeritan tangis dan rintihan akibat perlakuan para majikan di luar batas kemanusiaan. Kemanusiaan belum menjadi prioritas bangsa ini untuk tidak menjadikan rakyat sebagai budak bagi bangsa sendiri.

Realitasnya kemanusiaan telah direduksi hanya demi untuk mencari keuntungan mereka dengan tega menjual anak negeri ini menjadi budak di negeri orang lain. Tanpa ada rasa bersalah, pengiriman tenaga kerja secara legal dan ilegal dijadikan sebagai prestasi suatu rezim dan terus berlangsung tanpa ada usaha untuk memperbaiki sistem pengiriman tenaga kerja secara lebih manusiawi. Sudah sangat mendesak untuk merevisi pandangan pemerintah terhadap manusia, terhadap rakyatnya sendiri. Ini adalah negeri yang mendesak untuk memanusiaikan warganya di depan bangsa lain. Ini adalah negeri yang perlu dibangkitkan kembali rasa malunya sebagai bangsa, yang hilang karena arogansi dan keserakahan para elitnya.

Perlakuan yang manusiawi menjadi sangat penting agar penguasa di negeri ini memiliki kesadaran bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri adalah anak kandung negeri ini. Dia harus mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin haknya sebagai pekerja. Pekerja seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil, yakni mendapat upah yang sesuai dengan kontrak kerja. Kasus demi kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia seharusnya menjadi cermin lemahnya para pekerja kita yang tidak mendapatkan hak sebagai pekerja karena kontrak mereka selama ini dilakukan oleh sepihak. Kelemahan ini seharusnya bisa diatasi bila penguasa mau dan sungguh-sungguh membenahi masalah ketenagakerjaan. Saat ini, yang sering terjadi adalah munculnya kebijakan bukan untuk melindungi pekerja tapi sebaliknya melindungi kepentingan para calo. Para calo inilah yang sebenarnya memiliki kekuasaan tak terbatas karena di tangan mereka semua bisa diatur.

Persoalan ini tak pernah diselesaikan serius karena penguasa yang ada saat ini tidak memiliki hati terhadap mereka yang lemah. Bahkan para pemimpin tampaknya belum ada yang serius melihat ini sebagai persoalan besar bangsa. Banyak di antara para tenaga kerja yang menjadi ilegal karena kebijakan pembangunan selama ini tidak

memperhitungkan kaum yang paling lemah. Daya tawar mereka selama ini dibuat seolah-olah tak memiliki akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan selalu berpihak kepada para pemilik modal dan para calo. Di balik persoalan tenaga kerja yang begitu ruwet ini sebenarnya mencerminkan gagalnya penguasa melindungi rakyatnya. Rakyat selama ini dijadikan tumbal pembangunan.

Mereka seperti sapi perahan, setelah susu diambil nasib mereka diabaikan. Dan, lebih ironis lagi, para pemimpin belum memiliki “hati” terhadap mereka, padahal jasa mereka begitu besar bagi bangsa ini. Di tengah-tengah kegagalan penguasa menyediakan lapangan kerja, mereka menciptakan peluang tersebut. Para elite politik harus sadar tanpa mereka semua elite politik tidak akan memperoleh kursi kekuasaan ini. Kendati pada realitasnya mereka hanya dijadikan alat mobilitas kekuasaan belaka. Ini negeri di mana kaum pekerja nasibnya hanya dijadikan pemanis bibir, dan kekuasaan tidak pernah ramah terhadap mereka.

G. Penutup

Perbudakan adalah bagian masa lalu dari peradaban manusia yang telah dihapuskan dari permukaan bumi. Tetapi praktik-praktik seperti perbudakan sampai sekarang masih tetap ada dengan istilah yang berbeda. Praktik-praktik tersebut tampak secara kasat mata terjadi di belahan bumi ini, terutama di Timur Tengah, yang menjadi tempat lahir agama-agama besar dunia. Apalagi praktik-praktik tersebut seolah-olah mendapatkan pembenaran dari agama. Padahal jelas-jelas hal itu bertentangan dan tidak sejalan dengan misi agama. Sudah saatnya perbudakan, apapun nama dan bentuknya, harus dihapuskan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Migrasi internasional tenaga kerja Indonesia: harapan dan kenyataan (International migration of Indonesian migrant workers expectations and reality)*, Jakarta: Pusat Penelitian Unika AtmaJaya, 1995.
- Ahluwalia, *Tuan Presiden Jawablah Kritik Pedas Dengan Jitu*. <http://nasional.inilah.com/read/detail/1160722/tuan-presiden-jawablah-kritik-pedas-dengan-jitu> Kamis, 20 Januari 2011, diunduh 27 Januari 2011.
- Ardiansyah, Syamsul, *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran untuk Apa?*. <http://www.migrantcare.com> diunduh 23 Desember 2010.
- Basri, M Chatib, *Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita*, Harian Kompas, 25 Januari 2002.
- Berkaca dari Solusi Perbudakan*, <http://seeastrid.blogspot.com/2010/03/berkaca-dari-solusi-perbudakan.html>, diunduh 23 Desember 2010.
- Bernard Lewis, *Race and Slavery in the Middle East*, Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Castles dan Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, 4th edition. New York: Guilford Press, 2009.
- Clarence-Smith, Willian Gervase, *Islam and the Abolition of Slavery*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Davis, Robert C, *Christian Slaves, Muslim Masters*. Palgrave, Macmillian, 2004.
- Dirks, Jerald F. *Ibrahim Sang Sahabat Tuhan*. Terjemahan dari *Abraham, The Friend of God*, terj.: Satrio Wahono, Jakarta: Serambi, 2006.
- Gordon, Murray, *Slavery in the Arab World*, New York: New Amsterdam Press, 1987.
- Islam and Slavery*. <http://www.wikipedia.com>, diunduh 23 Desember 2010.

- Islamiy, Erfani el-, *TKW dan Paradigma Perbudakan*.
<http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=85100>, diunduh 27 Januari 2011.
- Kaleka, Norbertus. *Para Perempuan di Kolong Kandara*.
<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/01/19/134819/14/Para-Perempuan-di-Kolong-Kandara> 19 Januari 2011, diunduh 27 Januari 2011.
- Kawilarang, Renne R.A, dan Harriska Farida Adiati. *Deplu AS: 3 Juta WNI Jadi Korban Perbudakan*, Selasa, 15 Juni 2010,
<http://dunia.vivanews.com/news/read/157751-deplu-as--3-juta-wni-jadi-korban-perbudakan>, diunduh 27 Januari 2011.
- Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya*. <http://www.pusham.uui.ac.id>, diunduh 27 Januari 2011.
- Laporan Akhir Tahun 2010 Bidang Perempuan: TKW, Masih Menderita Kala Mengais Devisa*. Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 19 Desember 2010 h. 18.
- Linawati, Mevi. *Moratorium TKI 29 November 2010*.
<http://www.inilah.com/read/detail/1014872/cak-imin-moratorium-tki-ke-arab-saudi-berbahaya>, diunduh 27 Januari 2011.
- M. Syamsi Ali. *"Kasus Tenaga Kerja Wanita di Saudi Arabia"*
<http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Etc/TKW1.html>,
 diunduh 23 Desember 2010.
- Migrant Care: Pemerintah Kalah Sama Masyarakat Kecil Minggu, 23 Januari 2011*,
<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=15969>,
 diunduh 27 Januari 2011.
- Suharto, Edi. 2005. *Permasalahan Pekerja Migran: Prespektif Pekerjaan Sosial*,
www.Policy.hu, diunduh 23 Desember 2010.
- Susilo, Wahyu. *Pengkhianatan terhadap Buruh Migran*. Harian Kompas, 24 Mei 2010.

Syuhud, A. Fatih. "Mencegah Bentuk Baru Perbudakan". WASPADA Online 27 Mei 04, diunduh 23 Desember 2010, diunduh 27 Januari 2011.

Tenaga Kerja Indonesia: Duka di Negeri Gurun. Tempo Interaktif 29 November 2010, diunduh 23 Desember 2010.

Tobing, Elwin, 2004, *Migrasi Tenaga Kerja Global*, www.theindonesianinstitute.org, diunduh 27 Januari 2011.

Usman, Asyari, *Perkiraan Nasib TKI Tetap Buruk*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/01/110107_prospecttki.shtml?print=1 , diunduh 27 Januari 2011.